

**Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Naras 1
Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman**

Rizka Arifna¹, Nora Susilawati²
^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: arifnarizka@gmail.com, susilawatinora@gmail.com

Abstrak

Artikel ini didasarkan atas pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor tidak optimalnya pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Difusi Inovasi dari Rogers dan Shoemaker. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif tipe studi kasus jamak. Teknik pemilihan informan adalah *purposive sampling*. Untuk perolehan data penelitian didapatkan dari hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Kampung KB di Desa Naras 1 tidak berjalan secara optimal. Faktor tidak optimalnya, yaitu: 1) Lambatnya pemberian regulasi, 2) Tidak optimalnya peran lintas sektor, 3) Rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Masyarakat, Program Kampung KB, Tidak Optimal

Abstract

This article is based on the implementation of the Kampung KB Program in Naras 1 Village, North Pariaman District, Pariaman City. The purpose of this study is to explain the factors that are not optimal implementation of the Kampung KB Program in Naras 1 Village, North Pariaman District, Pariaman City. This study was analyzed using the Theory of Diffusion of Innovations from Rogers and Shoemaker. This research was conducted through a qualitative approach to the plural case study type. The technique for selecting informants is purposive sampling. For the acquisition of research data obtained from observations, interviews, documentation studies and literature studies. This study uses data analysis techniques from Miles and Huberman, namely data reduction, data display and conclusion drawing. The results showed that the Kampung KB Program in Naras 1 Village was not running optimally. The factors are not optimal, namely: 1) The slow provision of regulations, 2) The non-optimal role of the cross-sector, 3) The low level of community participation.

Keywords : Community, Kampung KB Program, Not Optimal



Received: April 29, 2020

Revised: May 10, 2020

Available Online: May 11, 2020

Pendahuluan

Program Keluarga Berencana adalah sebuah cara untuk mencegah masalah kependudukan secara terpadu. Program ini merupakan program pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (B. Lau, 2014). Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Baeti, 2013). Adanya hal tersebut terbentuklah keluarga kecil yang sejahtera di lingkungan masyarakat. Salah satu program pemerintah dalam menciptakan keluarga sejahtera adalah dengan melaksanakan Program Kampung KB melalui BKKBN. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat kampung, yang memiliki kriteria khusus. Kriteria tersebut seperti : 1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera berada di atas rata-rata pada tingkat kampung tersebut, 2) Jumlah peserta KB berada di bawah rata-rata pencapaian peserta KB pada kampung tersebut (BKKBN, 2017). Pada Program Kampung KB ini adanya program pembangunan keluarga, kependudukan dan pembangunan lintas sektor terkait. Kampung KB merupakan realisasi dari Program KKBPK. Pada Program KKBPK ini melibatkan berbagai bidang yaitu lembaga, instansi dan mitra kerja yang disesuaikan pada kondisi wilayah serta kebutuhan Kampung KB (BKKBN, 2017). Hal ini dilakukan mulai dari pemerintahan terendah di setiap kabupaten dan kota (Meiliyani, Amin, & Kondorura, 2019). Kampung KB dijadikan sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki kondisi keluarga, lingkungan sekitar serta aspek lainnya (Mardiyono, 2017). Bentuk pemberdayaannya yaitu melakukan program edukasi untuk memperbaiki suatu sikap, perilaku serta cara berpikir masyarakat menjadi lebih baik lagi (Sugiyono, 2016). Hal tersebut juga dinyatakan oleh Edi Suharto (2006) bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial harus diseimbangkan dengan maksud sebagai pendekatan pembangunan dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Syafri, D., & Fernandes, 2018).

Mantan Kepala BKKBN yaitu Surya Chandra Surapaty menyatakan bahwa Kampung KB dilaksanakan pada setiap wilayah yang ada di Indonesia sesuai dengan kriteria Kampung KB (Sugiyono, 2016). Provinsi Sumatera Barat juga menerapkan Program Kampung KB ini, termasuk di Desa Naras 1, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Desa Naras 1 merupakan sebuah desa yang padat penduduk. Desa Naras 1 dipilih sebagai Kampung KB dengan memiliki berbagai alasan, yaitu :

Pertama, Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Naras 1, selama empat tahun terakhir pendapatan Desa Naras 1 mengalami fluktuatif. Hal tersebut terlihat dari naik turunnya pendapatan Desa Naras 1 setiap tahunnya. Permasalahan ini terhitung sejak tahun 2011, dimana pada tahun ini pendapatan Desa Naras 1 yaitu sebesar Rp. 129.562.325. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012, pendapatan Desa Naras 1 mengalami kenaikan sebesar Rp. 148.822.292. Kemudian pada tahun 2013 pendapatan Desa Naras 1 mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaitu sebesar Rp. 212.226.000. Namun pada tahun 2014 pendapatan Desa Naras 1 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 153.422.935.

Kedua, Keluarga Pra Sejahtera di atas rata-rata. Desa Naras 1 memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah KK yang berada pada empat dusun yang ada di Desa Naras 1. Hasilnya menunjukkan bahwa banyaknya jumlah KK yang berada pada Keluarga Pra Sejahtera. Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan (Rodiah, 2016). Adanya hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan sosial pada masyarakat Desa Naras 1. Berikut ini tabel kesejahteraan sosial masyarakat Desa Naras 1:

Tabel 1. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Naras 1

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Keluarga Pra Sejahtera	50	KK	Jumlah KK = 113 KK
2.	Keluarga Pra Sejahtera 1	19	KK	
3.	Keluarga Pra Sejahtera 2	24	KK	
4.	Keluarga Pra Sejahtera 3	11	KK	
5.	Keluarga Pra Sejahtera 3 Plus	9	KK	

Sumber: Kantor Desa Naras 1 tahun 2015

Ketiga, Kualitas pendidikan masih rendah terutama pada masyarakat miskin. Desa Naras 1 memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hanya sebagian kecil masyarakat Desa Naras 1 yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada umumnya masyarakat Desa Naras 1 hanya tamatan SD. Berikut ini tabel tingkat pendidikan masyarakat Desa Naras 1 :

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Naras 1

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD/MI	180	175	354
2.	SMP/MTS	120	125	245
3.	SMA/K/MA	114	40	254
4.	PT /AKADEMI	20	19	39

Sumber: Kantor Desa Naras 1 tahun 2015

Adanya berbagai alasan tersebut, maka pada tahun 2016 Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu Nasrul Habit meresmikan Desa Naras 1 sebagai desa percontohan Program Kampung KB di Kota Pariaman. Untuk Program Kampung KB ini Gubernur juga memiliki korelasi dalam pelaksanaannya. Gubernur Sumatera Barat telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor 476/313/DPPKBPS.3/V-2017 mengenai penguatan Kampung KB yang berada di kabupaten/kota se Sumatera Barat. Pada tahun 2016 ditetapkan sampai pada tahun 2020 ini, pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1 tidak berjalan dengan optimal. Hal demikian dapat dilihat berdasarkan indikator keberhasilan Kampung KB. Indikator Kampung KB ini merupakan parameter untuk menentukan optimal atau tidaknya pelaksanaan Program Kampung KB. Indikator tersebut yaitu indikator input, indikator proses dan indikator output (Zuhriyah, Indarjo, & Raharjo, 2017).

Untuk menunjang kualitas masyarakat Desa Naras 1, adanya berbagai program yang harus dimaksimalkan untuk dilakukan, yaitu sesuai dengan delapan fungsi keluarga dengan cara membentuk sebuah kelompok kerja. Kelompok kerja tersebut terdiri dari delapan seksi. Berikut ini delapan seksi tersebut : 1) Keagamaan, 2) Pendidikan, 3) Reproduksi, 4) Ekonomi, 5) Perlindungan, 6) Kasih Sayang, 7) Sosial Budaya, 8) Pembinaan Lingkungan. Dari program-program yang ada pada delapan seksi kelompok kerja tersebut hanya sebagian program yang terlaksana. Berdasarkan indikator keberhasilan Kampung KB, belum ada indikator yang mencukupi tercapainya pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1. Adanya hal demikian, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Kampung KB tidak berjalan secara optimal di Desa Naras 1. Berdasarkan dengan adanya permasalahan tersebut, maka studi penelitian ini adalah faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Naras 1, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Naras 1, karena Desa Naras 1 adalah daerah yang pertama kali melaksanakan Program Kampung KB di Kota Pariaman. Penelitian ini dianalisis dengan metode pendekatan penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini adalah studi kasus jamak, yaitu penelitian yang menggunakan lebih dari satu isu dalam sebuah penelitian (Yusuf, 2014). Pada penelitian ini isu jamaknya adalah di Kota Pariaman terdapat 6 daerah yang menerapkan Program Kampung KB yaitu Naras 1, Karan Aur, Kampung Baru Padusunan, Tungkal Utara, Taluak dan Punggung Lading, namun disini peneliti meneliti tentang Program Kampung KB yang berada di Desa Naras 1. Alasan peneliti memilih tipe penelitian studi kasus jamak adalah agar dapat memberikan data yang lebih rinci, sehingga deskripsi hasil dari penelitian Program Kampung KB ini menjadi lebih akurat.

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitiannya yaitu BKKBN Provinsi Sumatera Barat, DP3AKB Kota Pariaman, Balai Penyuluh KB Kota Pariaman dan Masyarakat Desa Naras 1. Total informan mencapai 10 (sepuluh) orang informan. Teknik pengumpulan datanya yaitu : 1) Observasi non partisipasi (*non participant observation*). Pada saat observasi peneliti tidak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan, peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Naras 1 dalam pelaksanaan Program Kampung KB. 2) Wawancara mendalam (*in depth interview*), dimana peneliti memperoleh data secara langsung melalui tatap muka dengan para informan. 3) Studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan yang terarah mengenai Program Kampung KB. 4) Studi kepustakaan dengan cara membaca berbagai literatur mengenai Program Kampung KB (Sugiyono, 2009). Kemudian dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Silalahi, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Desa Naras 1 memiliki tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kota Pariaman. Pada tahun 2016 Desa Naras 1 diresmikan untuk melaksanakan Program Kampung KB. Namun pada tahap pelaksanaannya Program Kampung KB tersebut tidak berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil temuan didapatkan berbagai informasi mengenai faktor tidak optimalnya pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, yaitu:

Lambatnya Pemberian Regulasi

Regulasi dibentuk dengan tujuan agar kebijakan yang dioperasionalkan berjalan sesuai sasaran (BAPPENAS, 2011). Pada pengelolaan dan pelaksanaan mengenai Program Kampung KB ini, dibutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah setempat. Pemberian regulasi mengenai Program Kampung KB oleh Pemerintah Kota Pariaman tergolong terlambat. Regulasi mengenai Program Kampung KB ini baru dibuat pada tahun 2019 yang dicantumkan dalam surat keputusan Walikota Pariaman nomor 327/476/2019 tentang pembentukan kepengurusan kelompok kerja Kampung KB se Kecamatan di Kota Pariaman. Padahal Desa Naras 1 telah diresmikan sebagai daerah Kampung KB sejak tahun 2016. Hal ini merupakan karakteristik dari sebuah inovasi, yaitu kemampuan diujicobakan. Kemampuan diujicobakan merupakan tingkat dimana inovasi bisa diujicobakan pada batas waktu tertentu (Hanafi, 1987). Namun dapat dilihat bahwa Program Kampung KB sudah diuji cobakan tetapi lambat diadopsi oleh

masyarakat Desa Naras 1. Lambatnya pengadopsian Program Kampung KB ini disebabkan oleh lambatnya pemberian regulasi oleh Pemerintah Kota Pariaman. Hal tersebut dikarenakan Program Kampung KB baru pertama kalinya dibentuk di Kota Pariaman, sehingga Pemerintah Kota Pariaman belum memahami secara penuh mengenai hal-hal yang harus dilakukan. Kemudian belum adanya instruksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada rentang tahun 2017 sampai 2018 Pemerintah Kota Pariaman masih terfokus pada pembentukan Kampung KB. Setelah dinyatakan selesainya pembentukan Kampung KB di Kota Pariaman, Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan regulasi mengenai Kampung KB. Adanya keterlambatan pembuatan regulasi tersebut menyebabkan pelaksanaan berbagai kegiatan Program Kampung KB di Desa Naras 1 tidak berjalan dengan optimal.

Tidak Optimalnya Peran Lintas Sektor

Pada petunjuk teknis Kampung KB telah dijelaskan prosedur pengelolaan Kampung KB serta rincian pembagian tugas yang dijalankan oleh pihak terkait sesuai dengan harapan, termasuk peranan lintas sector (Latifah & Ulfatul, 2018). Adapun peranan lintas sektor terhadap Kampung KB antara lain : 1) Melakukan pembinaan kepada keluarga dan masyarakat di Kampung KB, 2) Mengembangkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sektor pembangunan yang dijalankannya, 3) Fasilitasi kegiatan secara fisik dan non fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung KB, 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan para pengelola dalam pembinaan Kampung KB (BKKBN, 2017). Tidak optimalnya peran lintas sektor di Kota Pariaman dalam mengintervensi pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1, dapat dilihat pada tidak terlaksananya semua peranan lintas sektor. Peranan lintas sektor hanya berjalan pada poin satu saja yaitu kegiatan pembinaan, sedangkan kegiatan lanjutan yang terdapat pada poin dua, tiga dan empat tidak terlaksana. Penyebab tidak terlaksananya kegiatan lanjutan dari lintas sektor disebabkan oleh tidak adanya pelaporan dari masyarakat. Hal demikian dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Naras 1 tidak memahami mengenai Program Kampung KB ini.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan dengan karakteristik dari sebuah inovasi, yaitu kerumitan. Kerumitan dari Program Kampung KB ini berada pada tingkat sulit. Kerumitan merupakan tingkatan sebuah inovasi dinyatakan sulit atau mudah dimengerti oleh masyarakat (Hanafi, 1987). Sulitnya masyarakat memahami mengenai Program Kampung KB ini, menyebabkan kurangnya keantusiasan masyarakat. Kurangnya keantusiasan masyarakat ini, dapat dilihat dari tidak adanya pelaporan yang jelas dari masyarakat ke Pokja Kampung KB dan Pemerintah Desa Naras 1 mengenai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak adanya tindakan lanjutan dari lintas sektor. Adanya hal tersebut menyebabkan pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1 tidak berjalan dengan optimal.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah peran serta individu atau kelompok yang berkontribusi mulai pada proses perumusan, perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan (Slamet, 1994). Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Naras 1 pada pelaksanaan Program Kampung KB, disebabkan karena partisipasi masyarakat tidak dilibatkan pada tahap perencanaan pembentukan Kampung KB. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk dilibatkan dalam tahap perencanaan (Syafri, Susilawati, & Hasmira, 2016). Namun partisipasi masyarakat Desa Naras 1 baru dilibatkan pada tahap pelaksanaan. Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Naras 1 dapat dilihat pada saat mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pada Pokja Kampung KB. Kegiatan tersebut yaitu : 1) BKB merupakan kegiatan pembinaan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak balita (Putri, 2012).

2) BKL merupakan kegiatan pembinaan kepada anggota keluarga yang memiliki lansia maupun lansia itu sendiri mengenai pelayanan dan perawatan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia tersebut (Anjani & Aulia, 2018). BKB dan BKL merupakan pokja seksi pendidikan (BKKBN, 2017). 3) UPPKS merupakan sebuah kelompok kegiatan usaha ekonomi produktif, UPPKS termasuk dalam pokja seksi ekonomi (Syamsul, Mediansyah, & Pakaya, 2019). Kelompok kegiatan UPPKS ini diutamakan kepada masyarakat yang tidak memiliki usaha, sehingga UPPKS ini dapat dijadikan sebagai wadah pengembangan usaha (Rianto, Nengsih, & Setyadiharja, 2019).

Berdasarkan penjelasan masyarakat Desa Naras 1 tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat belum memahami secara penuh mengenai inovasi ini. Adanya hal demikian dapat dijelaskan dengan karakteristik dari sebuah inovasi, yaitu kerumitan. Kerumitan dari Program Kampung KB ini berada pada tingkat sulit, sehingga dengan itu masyarakat tidak memahami dengan jelas bentuk kegiatan ini (Hanafi, 1987). Hal tersebut menyebabkan hanya sebagian masyarakat yang mengikuti kegiatan BKB, BKL dan UPPKS. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Naras 1 yaitu hanya 28,46 % masyarakat yang berpartisipasi pada kegiatan BKB. Kemudian 41,67 % pada kegiatan BKL dan 13,36 % masyarakat yang tergabung pada kelompok kegiatan UPPKS dari jumlah masyarakat Desa Naras 1 tahun 2019 yaitu 2.349 orang.

Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Naras 1 dalam mengikuti kegiatan BKB, BKL dan UPPKS, dikarenakan tidak adanya minat dan ketertarikan dari masyarakat, sehingga masyarakat tersebut tidak terlalu mementingkan dan menghiraukan kegiatan ini. Kemudian penyebab lainnya adalah sibuknya masing-masing masyarakat dengan aktivitasnya sendiri seperti bekerja. Pada umumnya masyarakat Desa Naras 1 bekerja sebagai nelayan, penyulam dan pedagang, sehingga ia tidak memiliki waktu yang jelas untuk mengikuti kegiatan pada Pokja Kampung KB.

Adanya hal demikian dapat dijelaskan dengan karakteristik dari sebuah inovasi, yaitu keunggulan relatif dari kegiatan ini. Keunggulan relatif merupakan tingkat sebuah inovasi dinyatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya. Keunggulan tersebut dapat terlihat dari berbagai segi yaitu dari segi kepuasan, kenyamanan dan ekonomi (Hanafi, 1987). Pada Program Kampung KB ini tidak terlihat manfaatnya pada beberapa segi, seperti pada segi kepuasan dan segi kenyamanan dari masyarakat itu sendiri dalam mengikuti kegiatan BKB dan BKL. Kemudian tidak merasakan keunggulan dari segi ekonomi bagi masyarakat dalam kegiatan UPPKS, sehingga masyarakat tidak antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Tidak adanya keunggulan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Naras 1 dalam mengikuti kegiatan ini, mengakibatkan pengadopsian Program Kampung KB lambat diterima oleh masyarakat Desa Naras 1. Adanya hal demikian menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal penyebab pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1 tidak berjalan dengan optimal, yaitu: *Pertama*, Lambatnya pemberian regulasi oleh Pemerintah Kota Pariaman mengenai Program Kampung KB yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu, karena baru pertama kalinya dibentuk di Kota Pariaman, belum adanya instruksi dari Pemprov Sumatera Barat, kemudian Pemko Kota Pariaman masih terfokus pada pembentukan Kampung KB. *Kedua*, Tidak optimalnya peran lintas sektor di Kota Pariaman dalam mengintervensi

Kampung KB menyebabkan pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Naras 1 tidak optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak terlaksananya semua peranan lintas sektor. Lintas sektor terkait hanya memberikan pembinaan namun tidak ada bentuk kegiatan lanjutannya. Tidak terlaksananya kegiatan lanjutan dari lintas sektor disebabkan oleh tidak adanya pelaporan dari masyarakat. *Ketiga*, Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Naras 1 untuk mengikuti berbagai kegiatan Kampung KB, disebabkan karena partisipasi masyarakat tidak dilibatkan pada tahap perencanaan. Partisipasi masyarakat baru dilibatkan pada tahap pelaksanaan. Rendahnya partisipasi masyarakat Desa Naras 1 dapat dilihat bahwa hanya sebagian masyarakat yang mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pada Pokja Kampung KB, yaitu kegiatan BKB, BKL dan UPPKS.

Daftar Pustaka

- Anjani, A. D., & Aulia, D. L. N. (2018). Pengaruh Pemberian Informasi Terhadap Pengetahuan Keluarga Tentang Bina Keluarga Lansia (BKL). *Journal of Midwifery Science*, 2(2), 73–76.
- B. Lau. (2014). *Buku Saku Kegiatan KKN Mahasiswa: Materi Bantu Penyuluhan Kependudukan, Keluarga Berencana, & Pembangunan Keluarga*. Yogyakarta: BKKBN.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Journal Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85–98. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i3.1984>
- BAPPENAS. (2011). *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*. Jakarta: BAPPENAS.
- BKKBN. (2017). *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman bagi Pengelola Kampung KB di Lini Lapangan)*. Jakarta: BKKBN.
- Hanafi, A. (1987). *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Latifah, S. N. H., & Ulfatul, U. (2018). Implementasi Program Kampung KB Sebagai Inovasi Strategis Pencegahan 4T (4 terlalu) Dalam Kehamilan di RW 10 Margadana, Tegal. *Kebidanan*, 8 (2), 130–138.
- Mardiyono, M. (2017). Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK dan Terkait di Jawa Timur. *Jurnal Keluarga Berencana*, 2(1), 2–10.
- Meiliyani, M., Amin, M. J., & Kondorura, D. (2019). Studi Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *Pemerintahan Integratif*, 7(2), 143–152.
- Putri, V. D. (2012). Praktik Pengasuhan Anak Pada Keluarga Petani Peserta Bina Keluarga Balita (BKB) Melati 3 di Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Early Childhood Education Papers*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/1090102040250107>
- Rianto, F., Nengsih, N. S., & Setyadiharja, R. (2019). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Tanjung Pinang. *Jurnal Dimensi*, 8(2), 286–306.
- Rodiah, I. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 39–55.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2016). *Suplemen Jurnal Keluarga: Mewujudkan Nawacita Melalui Kampung KB*. Jakarta: BKKBN.
- Syafrini, D., & Fernandes, R. (2018). Dampak Pergeseran Kebijakan Kota Tambang Menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Sawahlunto. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 74–82. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.23>
- Syafrini, D., Susilawati, N., & Hasmira, H. (2016). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Keluarga (Studi Kasus Kawasan Wisata Pantai Purus Padang). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 3(2), 122–139.
- Syamsul, Mediansyah, A. R., & Pakaya, S. (2019). Kajian Peningkatan Pendapatan Keluarga (Studi Pada Program UPPKS Kampung KB Kelurahan Dulalowo Kota Gorontalo). *Jurnal Economics Resources*, 2(1), 77–86.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zuhriyah, A., Indarjo, S., & Raharjo, B. B. (2017). Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(4), 1–13.